

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ady Kusnadi et al, 2000, *Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
- A. A Islahi, 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Halim, 2002. *Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Jakarta.
- Abdullah Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Yani, 2002, *Seri Keuangan Publik, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2008, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arif dkk, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2000, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Devas dkk, 1987, *Keuangan Daerah Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab* “Litbang Depdagri, Jakarta
- Euis Amalia, 2007, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Granada Press, Jakarta
- Halim, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Ibnu Syamsi, 1994, *Dasar-dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta

- India Garini, 2011, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung*, Universitas Komputer Indonesia Bandung
- Jaribah bin ahmad al haritsi, 2006, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatthab*, penerjemah H. Asmuni Solikan Zamarkhsyari, Khalifa, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta
- Josep Riwu Kaho, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- M.A Manan (terj), 1992, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, PT. Internasa, Jakarta
- M. Nazori Majid, 2003, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Pusat Studi Ekonomi Islam STIS-Yogyakarta, Yogyakarta
- M. Solly Lubis, 1996, *Dimensi-dimensi Manajemen Pembangunan*, Mandar Maju, Bandung
- Mamesah, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Manggaukang raba, 2006, *Akuntabilitas: Konsep Dan Implementasi*, UMM Press, Malang
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta
- _____, 2003, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi 1*, Andi Publisher, Yogyakarta
- Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mulyadi, 2002, *Auditing*, edisi 6, Salemba Empat, Jakarta

- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandung.
- Nick devas, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Nurlan, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Indeks, Jakarta
- Nurul Huda, dkk. 2008, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Ed:1, Kencana Prenada Media Group, cet ke-1, Jakarta
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*: Pustaka Bani Quraisy, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekarwo, 2005, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, ALFABETA, Bandung
- _____. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, Bandung
- Tjahjanulin, 2002, *Reinventing Keuangan Daerah*, *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 2 Nomor 2, Malang, Universitas Brawijaya
- Tjandra, W.Riawan, 2006., *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta
- Wahyudi kumurotomo, 2005, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*, Magister Administrasi Publik UGM, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Waluyo, S.Sos, M.Si, 2007, *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung
- Winarto Syrachmad, 1985, *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
alinea ke-4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015

C. Artikel / Jurnal

Anwar Nasution, “*Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Peranan BPK Dalam Mewujudkan Cita-Cita Reformasi Sistem Sosial Indonesia.*” Pidato Ulang Tahun ke-60, Badan Pemeriksa Keuangan, 8 Januari 2007, Jakarta, hal 1, Ketiga Undang-Undang mengenai Keuangan negara itu adalah masing-masing: (i) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (ii) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan (iii) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Devas dkk, 1987, *Keuangan Daerah Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab* “Litbang Depdagri, Jakarta

Abdul Rohman, 2007, *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.* Jurnal Maksi Vol7 No.2 ISSN: 1412-6680

D. Internet

<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/buku-keuangan-publik-pusat-dan-daerah>, diakses unduh 1 Oktober 2013

<http://www.rembangkab.go.id>, diakses unduh 20 Agustus 2015